

DEMOKRASI DAN HAM

ANGGOTA KELOMPOK

DANI YUNIARTA (08230063)

AGUSTINO ZULFA (08230011)

SURYA TRIYO ATMOJO (08230068)

PUJI RAHMAT PRATAMA (08230069)

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

PENGERTIAN DEMOKRASI

- 1. Menurut istilah berarti rakyat berkuasa (*demos* : rakyat, *kratos/kratein* : kekuasaan/berkuasa). Sehingga sistem pemerintahan dimana kekuasaan terletak pada mayoritas rakyat dan pelaksanaan dilakukan melalui wakil-wakil yang terpilih (*government of people, by people, for people*).
- 2. Menurut Abraham Lincoln, pengertian pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. SEHINGGA kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.(Abraham Lincoln :Pres. AS ke-16 1861-1865)

Lanjutan.....

- 3. Kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi, kebebasan pers (kelompok/individu)
- 4. Kesederajatan hak dan kewajiban yang sama, kedudukan yang sama di depan hukum.

Unsur – unsur Demokrasi

- Kedaulatan Rakyat
- Pemerintah
- Persamaan
- Partisipasi Masyarakat
- Kebebasan



Jenis-jenis Demokrasi

- Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat di bagi menjadi 2 yaitu :

DEMOKRASI LANGSUNG

menghendaki keikutsertaan setiap warga negara secara langsung untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang – undang.

DEMOKRASITIDAK LANGSUNG

tidak langsung/sistem perwakilan. Artinya, tidak setiap warga negara ikut terlibat langsung dalam menentukan kebijakan negara.

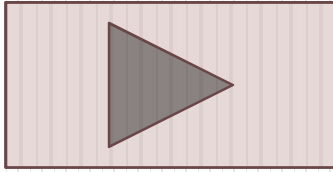
Demokrasi atas Hubungan alat Negara ada 2 yaitu :

- Demokrasi Presidensial

- Penanggung jawab pemerintah adalah Presiden
- Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
- Presiden bertanggung jawab kepada rakyat

- Demokrasi Parlementer

- Penanggungjawab pemerintahh adalah kabinet
- Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen/DPR
- Harus ada perdana menteri



Konsep Demokrasi

- Konsep Role of Law⁽¹⁾
- Konsep Henry B. Mayo⁽²⁾

1. A.V. Dicey dalam *introduction to the law of the Constitution*

Budiardjo, Mariam . *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka. 2009 (hal. 113)

2. Henry B. Mayo dalam *introduction to Democratic Theory*

Budiardjo, Mariam . *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka. 2009 (hal. 117)

Nilai-nilai konstitusional dalam Demokrasi Pancasila

1. Kedaulatan Rakyat
2. Ngr berdasar hukum
3. Pemerintahan berdasar konstitusi
4. Pemerintahan yg bertanggung jawab
5. Sistem Perwakilan
6. Bentuk ngr kesatuan, bentuk pemerintahan Republik
7. Sistem pemerintahan Presidensiil
8. Tidak mengenal klp oposisi

Demokrasi di Indonesia

- Demokrasi liberal
- Demokrasi terpimpin
- Demokrasi masa orde baru
- Demokrasi masa transisi
- Demokrasi masa reformasi



PENGERTIAN HAM :

- HAM: Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia hidup. Hak ini sangat mendasar sifatnya, artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan ras, Agama dan Gender.
- HAK asasi merupakan anugrah tuhan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi
- HAM : Sifatnya sangat mendasar atau asasi(Fundamental) sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai bakat, cita-cita, serta martabatnya.

Deklarasi HAM

- DUHAM 1948: Negara-negara Anggota PBB Menyepakati adanya HAM Yang sifatnya Universal.
- Deklarasi Menjadi pedoman/ standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia.
- Deklarasi ini menjadi pedoman moral dan edukatif bagi masyarakat Internasional.
- Kelemahannya adalah: Sifatnya tidak mengikat secara yuridis.

Konvenan

- Konvenan adalah perjanjian Internasional yang berkonsekwensi bahwa negara-negara yang mengikat diri pada perjanjian tersebut akan melaksanakan isi dalam perjanjian tersebut.
- Ratifikasi: Negara-negara yang terikat di dalam perjanjian tersebut menjadikan perjanjian tersebut menjadi bagian dari hukum negaranya.

Konvenan Hak ekonomi, sosial dan budaya

- Hak ekonomi
 - Hak atas pekerjaan(Pasal 6)
 - Hak untuk memilih atau menerima pekerjaan secara bebas

HAK SOSIAL

- Hak untuk mendapat standar kehidupan yang layak (Pasal 11 ayat 1)
- Hak untuk berkecukupan pangan (Pasal 11 ayat 1)
- Hak atas pemukiman (Pasal 11 ayat 1)
- Hak terbebas dari kelaparan (Pasal 11 ayat 2)
- Hak untuk mendapatkan jaminan sosial (Pasal 9)

HAK SOSIAL

- Hak untuk mendapatkan jaminan sosial (Pasal 9)
 - Pelayanan kesehatan
 - Jaminan bagi orang cacat
 - Jaminan hari tua
 - Jaminan kecelakaan kerja
 - Asuransi kesehatan
 - Jaminan pengangguran
 - Jaminan keluarga
 - Jaminan melahirkan

Hak sipil dan politik perempuan

- Hak untuk memilih dan dipilih
- Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah
- Hak untuk memegang jabatan dan menjalankan fungsinya di segala tingkat
- Hak untuk berpartisipasi dalam organisasi
- Hak untuk mewakili pemerintah
- Hak kewaraganegearaan (Diri sendiri dan anak ketika menikah dengan orang asing)

Hak ekonomi sosial dan budaya perempuan

- Hak untuk mencari nafkah dan memilih pekerjaan
- Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan
- Hak untuk membentuk dan terlibat dalam serikat kerja
- Hak untuk mendapatkan perlindungan dalam membentuk keluarga

HAK EKOSOSBUD PEREMPUAN

- Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus terhadap kehamilan
- Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam perkawinan
- Hak mendapatkan jaminan sosial dan asuransi sosial
- Hak untuk mendapatkan perilaku nondiskriminatif
- Hak atas pendidikan
- Hak mendapatkan perlindungan karya budaya
- Hak atas standar tertinggi kesehatan

HAM di Indonesia

- UUD 45 awalnya tidak memuat banyak pasal tentang HAM
- AMANDEMEN ke 2 masuk Satu BAB tentang HAM
- Konvenan Internasional diratifikasi setelah Reformasi politik bergulir
- UU No 39 tahun 1999 tentang HAM

Demokrasi dan HAM

- Demokrasi
 - Prosedural: Demokrasi di ukur dari prosedur
 - Subtansil: Demokrasi diukur dari tercapai atau tidaknya HAM.

Hak-hak budaya

- Hak atas pendidikan (Pasal 13)
- Hak untuk mendapatkan wajib belajar di tingkat dasar (Pasal 13)
- Hak atas kemajuan ilmu pengetahuan (Pasal 15)
- Hak untuk menjadi bagian dari kehidupan budaya (Pasal 15)

Hak ekonomi

- Hak untuk mendapatkan dan tidak terseingkir pekerjaan
- Hak membentuk serikat pekerja
- Hak Atas pensiun
- Hak tingkat penghidupan yang layak bagi diri dan keluarga termasuk pangan, pakaian dan perumahan, kesehatan yang layak.
- Hak atas pendidikan

HAK azazi Perempuan

- Hak azazi perempuan, Yaitu hak yang dimiliki oleh perempuan, baik sebagai dia manusia maupun sebagai perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Internet
- Budiarjo, Mariam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka. 2009